

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda

Yongki Wijaya¹

Abstrak

Masih adanya pemukiman tidak layak huni, lingkungan kumuh, minimnya keterampilan, kesulitan modal usaha, berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu BKM Mitra Mandiri Makmur sebagai wakil dari masyarakat Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Madya Samarinda berkeinginan untuk mendapatkan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai salah satu upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan selama ini diantaranya adalah kemiskinan. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Selili Kota Samarinda, pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan umum pelaksanaan PNPM Mandiri yaitu pemberdayaan yang merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *PNPM Mandiri, Pemberdayaan Masyarakat, Samarinda*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dari tahun ke tahun tetap memprioritaskan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam hal ini sistem desentralisasi (otonomi daerah) yang bertujuan melimpahkan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, serta kesejahteraan publik makin terjamin. Selain itu, otonomi daerah secara filosofi dimaksudkan untuk pencapaian

¹ Mahasiswa semester Sepuluh pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:yongkiwijaya147@gmail.com

pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghargai nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dari kerangka tersebut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang mana memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian kewenangan tersebut membuka peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan fungsi-fungsinya atas prakarsa sendiri, berdasarkan dengan kepentingan serta preferensi publik setempat dan potensi daerah.

Salah satu persoalan bangsa Indonesia, yang ditandai dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 230 juta jiwa dan memiliki angka kemiskinan 32,53 juta atau 14,15% dari total penduduk Indonesia. Sementara di Kalimantan Timur pada September 2011 angka kemiskinan masih cukup signifikan 247.130 jiwa atau 6,63% dari total penduduk Kaltim sebesar 3.550.586 jiwa, walaupun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 yakni 247.900 jiwa atau 6,77%, terlihat adanya penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 770 orang (<http://kaltim.bps.go.id>). Samarinda mempunyai penduduk 755.618 jiwa (BPS, 2011).

Dengan masuknya P2KP di Kelurahan Selili berdampak munculnya sejumlah warga masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang peduli terhadap pengentasan kemiskinan dan perkembangan Desa. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah relawan yang aktif dalam kegiatan P2KP. Selaras dengan tujuan dari Program *Neighbourhood Development* atau Program Pembangunan Lingkungan Pemukiman berbasis komunitas yang diluncurkan pemerintah yaitu untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari. Bahwa Kelurahan Selili memiliki potensi dan kekhasan wilayah seperti; kawasan perkampungan, kawasan pemukiman di sekitar kaki pegunungan, kawasan pemukiman di wilayah pertanian, dan kawasan bersejarah dengan diawalinya sejarah kota Samarinda di Kelurahan Selili oleh daeng Makona.

Di samping memiliki kekhasan wilayah juga memiliki persoalan-persoalan atau permasalahan pengembangan sosial, ekonomi dan lingkungan pemukiman yang perlu ditangani dengan segera. Dilihat dari kondisi masyarakat bermata pencaharian yang bermacam-macam, yaitu wiraswasta, buruh, pegawai negeri, pegawai swasta dan pedagang kecil. Kemudian masyarakat di kelurahan selili yang masuk kategori miskin adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh dan pedagang kecil. Karena dilihat dari pekerjaan dan upah yang diterima oleh mereka tidak sebanding dengan biaya dalam menghidupi keluarga mereka, sehingga sangat berpengaruh kepada kebutuhan yang diinginkan oleh keluarga mereka termasuk istri dan anak mereka. Karena pekerjaan dan upah yang diterima oleh seorang buruh dan pedagang kecil tidak menentu dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup, hal

tersebut akan menjadi faktor utama munculnya ketidaksanggupan seorang nelayan dan pedagang kecil sebagai kepala keluarga dalam membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan untuk anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka akan putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi yang dikarenakan permasalahan pekerjaan dan pendapatan yang diterima oleh seorang buruh dan pedagang kecil yang tidak tetap atau sesuai dengan kebutuhan hidup mereka tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Mazmanian dan sabatier (dalam Wahab, 2001:68) Implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingindiatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sementara itu menurut Edwards (dalam Winarno, 2002:125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebiakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sugiarti (2003:188), kata “*empower*” atau Pemberdayaan mengandung dua arti yaitu (1) adalah member kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain agar berdaya, dan (2) adalah upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Kecenderungan dalam proses yang pertama dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua merupakan kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki, melatih, dan meningkatkan kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog, berupaya dan bekerja. Secara luas istilah pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang

pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar pada kegiatan politik, oleh karenanya pemberdayaan dapat bersifat individual sekaligus dapat bersifat kolektif. Pemberdayaan dapat juga sebagai proses perubahan pribadi, karena setiap individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap keberadaannya.

b. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa aspek diantaranya dapat diketengahkan sebagai berikut (Suhendra:2006) :

Pertama, peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini sehingga antara pemerintah dan masyarakat saling adanya keterkaitan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka ini ada beberapa upaya yang harus dilakukan :

1. Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat.
2. Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri.
3. Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.
4. Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat.
5. Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.
6. Birokrasi harus menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Untuk dapat menjalankan misinya, maka birokrasi harus (1) ditingkatkan kewenangan sampai dilapisan rendah, (2) ditingkatkan kualitasnya, agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat harus diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik secara hierarkis seperti masyarakat desa dan kecamatan, maupun fungsional seperti PPL, guru, dokter, dan bidan.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat sendiri. Disini yang mempunyai potensi berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), disamping organisasi

kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. Lsm dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga ini dapat bersifat semi atau kuasiformal seperti LKMD, PKK, atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya.

Keempat, pendamping, penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya.

harus dicerminkan dalam proses perencanaan pembangunan nasional, sebagai aliran dari bawah keatas. Dewasa ini upaya tersebut telah dilakukan mulai dari tingkat desa dengan musyawarah pembangunan desa (LKMD), forum diskusi UDKP di tingkat kecamatan, sampai ke Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II, rapat koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I, Rapat Konsultasi Regional Pembangunan, dan Rapat Konsultasi Nasional Pembangunan.

Keenam, Keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha penduduk miskin.

Kemiskinan

Menurut ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemudian menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Dengan demikian kemiskinan adalah suatu bentuk keadaan hidup yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan

sangat tergantung pada kemampuan keluarga dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Artinya, didalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) telah dirumuskan kembali mekanisme kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan serta melibatkan masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan evaluasi, dengan memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Sehingga melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan (Pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 2007 :11). Adapun tujuan umum yang ingin dicapai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Selain itu PNPM Mandiri juga memiliki tujuan khusus, yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
4. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menaggulangi kemiskinan di wilayahnya.

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda

Berikut ini penulis akan menyajikan data-data serta menjelaskan mengenai Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota

Samarinda yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya terdiri dari serangkaian kegiatan diberbagai tataran mulai dari pusat, daerah, dan masyarakat, yang bersifat urutan, bersamaan atau terus menerus dengan adanya pemantauan dan pendampingan.

Sehingga dalam tahapan pelaksanaan ini mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada siklus rembug kesiapan masyarakat, dan kerelawanan, pemetaan swadaya yang berorientasi pembentukan BKM, Perencanaan partisipatif menyusun PJM Pronangkis berorientasi kinerja peningkatan IPM-MDGs dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat dengan stimulan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) oleh LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), serta adanya dana melalui APBN dan APBD untuk pelaksanaan kegiatan pada bidang lingkungan, sosial, ekonomi tersebut. Dalam hal ini kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di masyarakat kelurahan/desa adalah proses menumbuhkembangkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari, oleh dan untuk masyarakat.

a. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Lingkungan

Pelaksanaan pada bidang lingkungan yang terdapat di dalam program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yaitu pelaksanaan pada bidang pembuatan/pebaikan prasarana lingkungan. Prinsip dasar yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam PNPM Mandiri perkotaan adalah meminimalkan efek negative dan memaksimalkan efek positif dari setiap kegiatan konstruksi. Pelaksanaan pada kegiatan pada bidang lingkungan ini dilakukan pada pertengahan tahun 2009-2010 dengan menganggarkan pembuatan jamban atau MCK dan semenisasi jalan. Dalam hal ini sifat kemanfaatan secara langsung memberikan dampak atau manfaat kolektif dengan akses melalui peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman yang sehat, tertib, aman dan teratur.

b. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sosial

Setiap langkah kegiatan PNPM-MP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan yang dilakukan pada bidang sosial lebih mengarah kepada pemberian santunan untuk warga jompo/janda miskin dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Sehingga dalam hal tersebut sudah pasti bahwa kegiatan pada bidang sosial tersebut merupakan kegiatan yang mengarah serta ditujukan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan adanya kegiatan

pada bidang sosial ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dalam masalah pembiayaan kebutuhan hidupnya maupun keluarganya.

Adapun pemberian bantuan ini berdasarkan pada prosedur dan ketentuan yang ada. Dalam hal ini BKM harus benar-benar teliti dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin tersebut agar nantinya dalam proses pemberian bantuan ataupun santunan dari kegiatan pada bidang sosial ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta yang berhak menerima dan mendapatkan bantuan tersebut adalah benar masyarakat atau warga miskin yang membutuhkan bantuan tersebut.

c. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ekonomi

Pelaksanaan kegiatan pada bidang ekonomi ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan dalam rangka menunjang pendapatan. Dalam hal ini, yang dimaksud keterampilan adalah bahwa setiap masyarakat/ warga pasti memiliki potensi atau kemampuan yang ada didalam dirinya masing-masing. Akan tetapi yang menjadi faktor utama tidak tergalinya potensi atau kemampuan yang dimiliki masyarakat tersebut adalah tidak adanya biaya atau modal yang dapat menunjang potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sehingga dalam hal ini perlu adanya suatu cara atau rencana yang harus dilaksanakan dan di implementasikan agar dapat membantu meningkatkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada bidang ekonomi ini, PNPM-MP di Kelurahan Selili lebih mengarah pada kegiatan yang berbentuk perdagangan yaitu pinjaman modal dan pelatihan menjahit. Melalui kegiatan pada bidang ekonomi tersebut diharapkan bahwa nantinya masyarakat yang mendapatkan pelatihan-pelatihan dan menerima bantuan modal bergulir tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau potensi yang dimiliki untuk menuju pada kesejahteraan kehidupan.

Peran BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Kelurahan Selili Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

a. Organisasi Kelembagaan BKM

BKM Mitra Mandiri Makmur dibentuk melalui Rembug Pembentukan BKM pada tanggal 14 Nopember tahun 2007 yang dihadiri oleh 68 orang. Dalam rembug tersebut dibahas dan disepakati Visi, Misi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar BKM dan anggota BKM.

BKM Mitra Mandiri Makmur Kelurahan Selili sejak awal dibentuk pada tahun 2007 hingga periode kepengurusan sekarang hasil pemilu tahun

2007 dalam setiap kegiatannya senantiasa mendasarkan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan pada P2KP diantaranya adalah pemberdayaan dengan keterbukaan. Dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, tokoh masyarakat, swasta, organisasi sosial, lembaga pemerintah maupun lembaga desa yang ada, RT dan sebagainya. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BKM baik rutin maupun secara periodik antara lain :

1. Rapat rutin BKM bersama UP-UP setiap awal bulan, sebagai evaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Sehingga setiap persoalan/kendala dapat segera ditindaklanjuti untuk diatasi.
2. Rapat koordinasi bersama pemerintah desa dan lembaga-lembaganya.
3. Sosialisasi dan koordinasi dan pembekalan kepada KSM-KSM setiap pengajuan proposal kegiatan maupun laporan akhir kegiatan.
4. Pembentukan Kelompok Belajar Perkotaan (KBP), sebagai salah satu lokomotif atau sumber inspirasi adanya ide-ide segar dalam membangun dan menata Kelurahan Selili ini menjadi Lingkungan yang berwawasan dan bermartabat.

Dalam rangka mensikapi untuk meraih program *Nighbourhood Development (ND)* ini, BKM Mitra Mandiri Makmur Kelurahan Selili segera membentuk “Tim/kelompok kerja sukses ND” Kelurahan Selili yang melibatkan semua pihak, yaitu BKM, masyarakat, pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa yang ada. Tim/kelompok kerja ini dibentuk pada tanggal 21 Maret 2009 setelah mendapatkan Surat Pemberitahuan dari Koordinator PNPM Koordinator Kota Samarinda tentang BKM Mitra Mandiri Makmur berhak untuk diusulkan sebagai prioritas penerima program ND. Selanjutnya tim tersebut bekerja sesuai dengan bidangnya sebagaimana batas waktu atau jadwal yang telah ditetapkan. Khusus Tim Sosialisasi dan review PJM Pronangkis langsung menindaklanjuti dengan koordinasi dan sosialisasi dengan semua ketua RT. Selanjutnya membuat jadwal pertemuan warga di dusunnya masing-masing yang dihadiri oleh Tim bersama BKM. Dari sosialisasi ini diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman tentang PNPM yang ditindaklanjuti dengan program ND, sehingga memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis. Dari dialog dan diskusi yang dikembangkan setiap pertemuan, ternyata masyarakat sangat antusias untuk membangun atau menata Kelurahan Selili ini menjadi kawasan pemukiman yang ramah dan nyaman.

Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan

Program Jangka Menengah

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin diperkotaan terutama pada Kelurahan Selili, program yang kami laksanakan terfokus pada bidang-bidang yang sangat mendesak / skala prioritas untuk dilaksanakan dalam kegiatan pada masyarakat yang ada di Kelurahan.

Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan untuk 3 tahun kedepan dirumuskan berdasarkan hasil-hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas dalam lokakarnya tingkat kelurahan dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan yang telah disusun serta usulan tata ruang wilayah kelurahan. Rencana Program Jangka Menengah dalam Program Penanggulangan Kemiskinan (pronangkis), unit lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

Rencana-rencana pengembangan program meliputi beberapa bidang antara lain sebagai berikut :

- a. Program bidang sosial
- b. Program bidang lingkungan
- c. Program bidang ekonomi

Sistem dari pelaksanaan program ini akan dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ketahun. Yang artinya kepada setiap akhir tahunnya akan dilakukan evaluasi dan revisi data Pemetaan Swadaya (PS) dan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM PRONANGKIS) terhadap bidang-bidang mana yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana guna menyesuaikan program pengembangan pada tahun berikutnya.

Rencana Tahunan (1 Tahun)

Alokasi dana tahunan diambil dari alokasi dana 3 tahun dan merupakan kesepakatan semua pihak di kelurahan. Alokasi dana tahunan ini adalah merupakan dana sharing yang berasal dari bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM P2KP sebesar 50 % dengan dana APBD juga 50 % dari pagu dana sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran alokasi dana PJM pronangkis 1 tahun. Dengan adanya program usulan dari hasil tim pemetaan swadaya dan perioritas kegiatan yang di susun oleh BKM''MITRA MANDIRI MAKMUR'' kelurahan selili, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan sasaran tepati. Di samping itu di harapkan mampu menumbuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk dapat berperan aktif serta merasa haderbeni dalam peroses pembangunan.Ponangkis dibuat sebagai sarana pembelajaran serta pedoman sehingga dalam pelaksanaannya nanti sebagai tolak ukur dan arah pembangunan yang berkesinambungan atas dasar perinsip-perinsip kemasyarakatan yaitu demokrasi, partisipasi, transparansi, dan desentralisasi.

Penutup

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda pada kegiatan yang mencakup Tridaya Yaitu Bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pelaksanaannya sudah dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui kegiatan dari pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan yang telah sesuai dengan usulan dan kebutuhan

masyarakatnya. Adapun kegiatan yang sudah terlaksana yaitu dibagi pada beberapa bidang kegiatan yaitu, yang pertama bidang lingkungan dimana kegiatan yang sudah terlaksana seperti semenisasi jalan dan pembuatan atau perbaikan mck dengan anggaran atau pembiayaan dana total dari pemerintah maupun sumber lain sebesar Rp 140.750.000. Kemudian pada bidang sosial yaitu, memberikan santunan untuk warga jompo/janda miskin dan bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu yang mana total dana yang diberikan berjumlah Rp 651.500.00. Selanjutnya pada bidang ekonomi yang telah terlaksana juga dua jenis kegiatan yaitu pinjaman modal untuk berwirausaha atau perdagangan dan pelatihan menjahit. Pada bidang ini masyarakat dilatih untuk membuka usaha dan mengikuti pelatihan menjahit agar mereka memiliki pengalaman dan membantu perekonomian keluarga masing-masing. Total anggaran dana yang diberikan sebesar Rp 131.650.000.

Faktor pendukung dari program ini adalah dukungan aparat desa, tokoh masyarakat, kecamatan, kabupaten/kota serta bantuan baik secara material, pemikiran dan tenaga dari masyarakat. Kemudian untuk sarana dan prasarana yang digunakan seperti komputer dan mesin ketik serta perlengkapan lainnya yang menunjang untuk kegiatan tersebut, karena hal ini cukup membantu dalam mendiskusikan atau saat melakukan musyawarah tentang kegiatan yg akan dilakukan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sulitnya alokasi penjadwalan waktu pertemuan karena beragamnya aktivitas masyarakat, keuangan atau pendanaan yang dibatasi untuk setiap kegiatan pembangunan. Kemudian kondisi alam/cuaca yang tidak menentu menghambat dalam pelaksanaan konstruksi sehingga dapat menyebabkan pekerjaan tidak tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, Melayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Masri, Singrimbun dan sopian effendi. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Indonesia; Anggota IKAPI.PT.Pustaka LP3ES.
- Matthew, B. Miles dan Huberman, Penterjemah Sugiono. 2010. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit UI.
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit Citra Utama, Jakarta, 2005

Dokumen-Dokumen:

- Tim pengendali PNPM Mandiri. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) 2007/2008
- Pedomanpelaksanaan PNPM MandiriPerkotaan 2008. Bersama Membangun Kemandirian dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan

Sumber Internet :

- <http://www.pnpm-mandiri.org>(Diakses tanggal 15 Juli 2012)
- http://www.ppk.or.id/Kebijakan_pnpm_mandiri.pdf(Diakses tanggal 25 juli 2012)
- [www.p2kp.org/Pemberdayaan Masyarakat-dan Permasalahannya](http://www.p2kp.org/Pemberdayaan_Masyarakat-dan_Permasalahannya) (diakses tanggal 19 oktober 2012)